

1720

Laporan Tahunan Penabulu



Bersama Menkuatkan Negeri

Laporan Tahunan Yayasan Penabulu
Tahun 2017

INDEKS

- 1- Sekapur Sirih
- 2- Profile Organisasi
- 3- Visi, Misi, dan Isu Strategis
- 4- Program Tahun 2017
- 5- Kilas Program 2017
- 6- Laporan Audit 2017
- 7- Figur Keuangan 2017

Bersama Menguatkan Negeri

Di fase lanjutan siklus pertumbuhan ke-3 Penabulu ini, keyakinan kami atas pemaknaan ulang definisi “masyarakat sipil” yang menjadi akar pertumbuhan kami semakin diteguhkan. Tahun 2017 diawali dengan berbagai macam kejadian sebagai ekses dinamika politik dalam negeri dan sepanjang tahun merupakan masa yang cukup dinamis bagi semua kalangan. Bencana alam berupa erupsi Gunung Agung di Bali yang menjadi penutup tahun, membuat kami semakin memahami bahwa keberdayaan masyarakat sipil merupakan modal utama untuk menghadapi setiap turbulensi situasi yang terjadi.

Kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam merespon situasi memang tidak dapat dilepaskan dari cukupnya pengetahuan dan mumpuninya keterampilan masing-masing individu yang menjadi komponen masyarakat. 9 Isu Strategis yang Penabulu usung sebagai kerangka program di siklus tumbuh ke-3, membuat Penabulu berupaya sekuatnya untuk membuka dan menciptakan ruang-ruang yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan ide serta melahirkan inisiatif baru, sebagai bagian dari upaya penguatan masyarakat sipil.

Tahun ini juga merupakan tahun dimana kerja-kerja kolaboratif dan multisektoral banyak kami lakukan, sebagai bentuk keyakinan kami bahwa kesuksesan pembangunan berkelanjutan begitu sangat tergantung pada ketangguhan masing-masing pilarnya. Beragam program yang kami kerjakan di tahun ini merupakan program-program yang meletakkan aktor-aktor pembangunan baik pemerintah maupun sektor bisnis sebagai pemangku utama program. Pelibatan ini, selain sebagai bentuk dukungan kami kepada dua aktor pembungan lain, juga sebagai upaya menjaga keberlangsungan program.

Secara internal organisasi 2017 merupakan masa dimana kami memaksa diri kami untuk melahirkan beragam inisiatif baru sebagai bentuk perluasan gerak dan manfaat Penabulu bagi komunitas dan masyarakat. Kesenian dan budaya, pendidikan alternatif, ekonomi alternatif, ketiga sektor yang mampu menjadi perekat dan pengikat segala bentuk isu sosial kemudian menjadi fokus kami di tahun ini. Keseriusan kami dalam melahirkan inisiatif baru ini tak lepas dari kesadaran bahwa keberlanjutan organisasi juga dipengaruhi oleh relevansi dan signifikansi keberadaan organisasi.

Akademi Komunitas Samudera Wiyata di Bawean Jawa Timur mulai diinisiasi di tahun ini. Sebuah ruang pendidikan alternatif yang kami harapkan dapat mendukung komunitas untuk memberdayakan diri mereka sendiri dalam ruang kolektif. Pada saat yang bersamaan, kami menginisiasi Art and Culture Investment, ruang lain yang kami dedikasikan untuk sektor kesenian dan kebudayaan, sektor krusial yang memiliki kelenturan yang efektif untuk membendung dampak buruk situasi dengan caranya yang khas.

Segala bentuk yang Penabulu lakukan sejak didirikan hingga saat ini merupakan bentuk nyata sumbangsih dan keberpihakan kami bagi masyarakat Indonesia. Memastikan bahwa semua pihak mendapatkan akses yang sama dan tidak ditinggalkan di belakang merupakan salah satu tugas yang akan terus kami emban, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Eko Kurniawan Komara
Direktur Eksekutif

Sekapour Sirih

Yayasan Penabulu

Didirikan di Jakarta pada tahun 2002 dan disahkan oleh notaris Riana Hutapea melalui Akta No.1 tertanggal 22 Oktober 2003 serta dikukuhkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM RI No: C-435 HT.01.02.TH 2004. Semenjak berdiri, Penabulu telah meletakkan visinya pada keberdayaan organisasi masyarakat sipil Indonesia.

Pada periode pertama 2002–2009, Penabulu menemukan momentumnya yang pertama, dengan fokus penguatan pada aspek pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. PSAK 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 yang dikeluarkan oleh IAI tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang mulai diberlakukan efektif sejak tahun buku 2000 (kemudian direvisi pada tahun 2011) menjadi latar belakang utama kerja penguatan Penabulu pada periode tersebut. Berbasis standar pelaporan keuangan tersebut, tuntutan akuntabilitas organisasi nirlaba mulai disuarakan dengan kuat terutama oleh lembaga donor, penyumbang sumber daya terbesar organisasi masyarakat sipil Indonesia. Periode tersebut ditutup dengan pengembangan komunitas keuangan LSM, ruang berbagi pengetahuan dan literasi dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi yang kala itu didorong berkembangnya era web interaktif 2.0, web yang memungkinkan adanya interaksi online antar anggota komunitas.

Pengalaman Penabulu sebelumnya dalam menguatkan kapasitas pengelolaan keuangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, membawa Penabulu bersentuhan dengan elemen pengelolaan organisasi yang lain. Penabulu kemudian sampai pada kesimpulan dan keyakinan baru, bahwa transparansi, akuntabilitas serta keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya bisa dibangun di atas ketangguhan pilar pengelolaan keuangan belaka.

Maka pada periode kedua 2010–2014, Penabulu mencoba mengembangkan fokus kerja tambahan dengan titik tekan baru pada aspek penguatan pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan program (perencanaan-pemantauan-evaluasi), pengelolaan sumber daya manusia, maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seiring dengan pengelolaan data-informasi-pengetahuan. Selain aspek manajemen tersebut, Penabulu juga mulai mengembangkan kompetensi dan portofolio pada upaya penggalangan sumber daya dan pengembangan model-model bisnis sosial.

Periode pertumbuhan kedua ini bersamaan dengan setengah-perjalanan transformasi besar organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Selain perubahan eksternal yang mendasar seperti perkembangan dahsyat era teknologi digital, pergeseran pendulum kekuatan ekonomi dunia, serta laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri; berubahnya isu dukungan dan pola pendanaan lembaga donor merupakan pemicu utama proses transformasi tersebut. Pada periode transformasi ini, penguatan kelembagaan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mendapati dukungan puncaknya. Isu akuntabilitas sebagai sasaran penguatan di periode awal telah dikuatkan dengan isu profesionalitas (efektifitas dan efisiensi kinerja) dan juga isu keberlanjutan (atau ancaman ketidakberlanjutan) organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Momentum tersebut memungkinkan Penabulu untuk mengembangkan unit-unit layanan utama dan pendukung, melakukan kreasi atas produk-produk hasil pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama ini, melakukan kerja kolaboratif bersama sekian banyak mitra strategis, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan pada saat yang sama, mencoba mendiversifikasi sumber-sumber dukungan pendanaan organisasi.

Masih dalam kerangka tuntutan transformasi organisasi masyarakat sipil Indonesia, lahirlah Penabulu Alliance pada periode pertumbuhan kedua tersebut; aliansi strategis pengembangan gagasan, inisiatif, dan kegiatan penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam bentuk 'keterikatan yang lepas', dimana setiap elemen didalamnya memiliki kebebasan gerak dalam pencapaian tujuannya masing-masing, namun tetap terikat secara kolektif pada visi bersama dalam jangka panjang, yaitu: keberdayaan dan keberlanjutan masyarakat sipil di Indonesia. Penabulu memaknai rekayasa institusi ini sebagai sebuah upaya membangun keberlanjutan tujuan organisasi di masa depan; fokus pada kemandirian unit masing-masing dalam pelayanan, dan mencoba bertahan hidup dari keunggulan layanan dan produk dari masing-masing unit itu sendiri, tidak lagi harus bergantung pada dukungan lembaga donor.

Strategi dan proses pencapaian tatanan akhir periode pertumbuhan kedua Penabulu masih akan terus berlangsung dan masih perlu diuji serta dimodifikasi. Bersamaan dengan itu, Penabulu kini memasuki periode pertumbuhan ketiga sejak awal tahun 2015.

Pada periode baru ini, Penabulu menyadari bahwa definisi 'masyarakat sipil' perlu dimaknai ulang. Bukankah: komunitas pengelola sampah, kelompok-kelompok relawan, jurnalis independen, asosiasi profesi, usahawan sosial, kelompok-kelompok perempuan dan juga komunitas-komunitas difabel atau inisiatif kolektif lainnya yang menyodorkan solusi alternatif dan bahkan sekitar 74 ribu desa yang kini memperoleh sumber daya tambahan; seluruhnya merupakan elemen masa kini dari masyarakat sipil Indonesia? Di masa depan, Penabulu meyakini bahwa peran masyarakat sipil dalam pembangunan berkelanjutan akan semakin tak tergantikan sebagai penjaga keseimbangan akhir di antara aktor pembangunan lainnya: pemerintah dan sektor bisnis. Namun keberadaan masyarakat sipil sendiri sesungguhnya terancam oleh beberapa masalah internal, antara lain kesenjangan sumber daya pendukung kerja jangka panjang, lemahnya kapasitas kelembagaan dan buruknya konsolidasi kekuatan di masing-masing sektor isu.

Penabulu kini mendorong dirinya untuk mengambil peran sebagai 'civil society resource organization'. Sebagai organisasi sumber daya bagi masyarakat sipil di Indonesia, Penabulu akan berusaha sebaik-baiknya memobilisasi, mengelola dan menyalurkan sumber daya dalam bentuk apapun demi mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia. Penabulu sedapat mungkin akan mengkonversi energi yang diperoleh bagi upaya-upaya penguatan, pemberdayaan dan penjaminan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Merubah energi menjadi ruang tumbuh bersama, ruang konsolidasi kekuatan ide, gagasan dan keberpihakan masyarakat sipil di Indonesia, menjadi pemicu dan pemacu tata kelola pembangunan negeri ini yang lebih baik di masa depan.

Profile Organisasi

VISI

“Masyarakat sipil Indonesia yang berdaya”



Pelabuhan Long Bagun Sungai Mahakam, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

MISI

Mendorong keberdayaan dan keberlanjutan posisi dan peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia melalui upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi; mobilisasi, pengelolaan dan penyaluran sumber daya; pengembangan kemitraan setara antar sektor pembangunan serta penggalangan partisipasi dan keterlibatan publik seluas-luasnya.

ISU STRATEGIS

1. Pembangunan Inklusif
2. Pasar Berkelanjutan
3. Kemitraan Pemerintah – Swasta-Komunitas
4. Kehutanan dan Lingkungan
5. Pemberdayaan Desa
6. Kesehatan Masyarakat
7. Akuntabilitas Publik
8. Penguatan Kelembagaan
9. TIK dan Pengelolaan Pengetahuan

CEGAH – MSI
(Management System International)
Pemantauan dan Advokasi untuk Penyampaian Peningkatan Layanan Masyarakat di Sektor Kesehatan

Zoological Society of London (ZSL)
Master Plan Development for Landscape Managing Management in Kelola Sendang

Yayasan Gugah Nurani Indonesia
Activity Development Income Generation Yayasan Gugah Nurani Indonesia

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)
Corporate Capacity Building in Effective Conflict Handling on Indonesian Land-Based Sectors

Robert Bosch Stiftung
Training on Ressource Mobilisation for 90 CSOs in 6 Regions in Indonesia

Program Berjalan Tahun 2017



Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan
Membangun Usaha Masyarakat dan Perluasan Jaringan Pasar Berbasis Pemanfaatan Berkelanjutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Perhimpuna Pengembangan Media Nusantara (PPMN)
Penyusunan Rencana Strategis Sebagai Bagian Pengembangan Organisasi

Yayasan Pengantau Independen Kehutanan Indonesia (YPIKI)
Preparation of Standard Operational Procedure (SOP) for Grant Making, Accounting and Finance of Yayasan Pengantau Independen Kehutanan Indonesia (YPIKI)

Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG)
Workshop and Training on the Establishment of Village-Owned Enterprises and Cooperatives within the Framework of Peat Restoration

ICCO Cooperation Aliansi Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pemberdayaan Petani Kecil

Sejak

2016

- CEPF
Strengthening The Capacity of Civil Society Organizations for Effective Conservation Action in Indonesia
- KOMPAK - Abt JTA
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Publik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Layanan Garis Depan
- Millennium Challenge Account - Indonesia MCA-I
Proyek Kemakmuran Hijau - Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat
- PT. Pertamina Hulu Energi
Strengthening of Processing and Marketing Unit of Koperasi Kakao Unggul, Lhok Sukon
- MAMPU – Cowater
Panel Arrangements for Organizational Strengthening Services in Phase II
- Indonesia AIDS Coalition
Resources Mobilization Workshop for Strengthening The HIV/AIDS Key Population in Indonesia
- IDRAP
Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat Pemerintah Desa hingga Kabupaten di wilayah kerja IDRAP
- ICCO-KIA
Business Coaching and Business Plan Development for Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LPDM) In Central Java

Selengkapnya silakan kunjungi: <http://penabuluanalliance.org/program>

Catatan keuangan Penabulu tahun 2017 merekam tak kurang dari 21 program dalam berbagai skala pendanaan, baik program baru maupun program-program yang berasal dari tahun sebelumnya terlaksana di tahun ini. Keseluruhan program dilaksanakan sesuai dengan masing-masing isu strategis maupun cross cutting antar isu. Berikut catatan-catatan menarik dari beberapa program yang berjalan maupun berakhir di tahun 2017.

Kontribusi bagi Sektor Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan yang inklusi dan berkelanjutan. Di masa dimana masyarakat menuntut adanya percepatan pelayanan di semua lini sebagai dampak dari globalisasi, sudah seyogyanya pemerintah sebagai pelayan masyarakat melakukan segala bentuk inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, sektor pelayanan publik yang baik tidak akan dapat dilepaskan dari tata kelola yang transparan dan akuntabel oleh pemerintah sebagai penyedia layanan. Tantangan ini hanya dapat dijawab melalui peningkatan kapasitas bagi penyedia layanan publik dan pada saat yang sama juga dilakukan peningkatan kapasitas sebagai pengguna layanan sehingga akan mendorong partisipasi yang berkualitas.

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Publik untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Layanan Garis Depan yang didukung oleh KOMPAK – Abt JTA merupakan upaya kami dalam mendukung percepatan perbaikan sektor pelayanan publik. Program yang dilaksanakan sejak tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah setempat dan unit pelayanan untuk dapat dengan lebih baik menyalurkan/memenuhi kebutuhan dasar pengguna layanan/masyarakat dengan memperkuat sistem, proses dan prosedur layanan.

Di tahun 2017 program ini telah merampungkan penyusunan serial modul Public Finance Management (PFM) yang menjadi hasil utama program. Seri modul PFM ini terdiri atas; (1) Modul Pengelolaan Keuangan UPTD Pendidikan; (2) Modul Pengelolaan Keuangan UPTD Puskesmas; (3) Modul Pengantar Pengelolaan BLUD; (4) Modul Pengelolaan Keuangan BLUD; (5) Modul Pengelolaan Keuangan Kecamatan; dan (6) Modul Optimalisasi Kecamatan dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Selain modul, juga dihasilkan aplikasi portabel pembelajaran PFM bagi *Frontline Service* sebagai alat bantu belajar dan simulasi.

Selain KOMPAK-Abt JTA dalam kerangka perbaikan layanan publik, pada tahun ini Penabulu juga mendapatkan dukungan dari USAID-CEGAH-Management System International (MSI) dalam program **Pemantauan dan Advokasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik di Sektor Kesehatan** dengan fokus lokasi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Capaian di akhir program ini adalah meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat dalam melakukan pemantauan dan penelusuran pelayanan publik di sektor kesehatan. Dalam proyek ini peran Penabulu lebih pada memfasilitasi terbentuknya jaringan organisasi masyarakat sipil lokal dan memberikan pendampingan lanjutan bagi jaringan untuk dapat melakukan advokasi untuk perbaikan layanan publik khususnya di sektor kesehatan.

Capaian utama yang dihasilkan oleh program ini adalah, ditandatanganinya komitmen perbaikan layanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh; Walikota, Dinas Kesehatan, RSUD, DPRD dan Ombudsman perwakilan Provinsi Banten, berdasarkan hasil rekomendasi oleh jaringan organisasi masyarakat sipil sesuai dengan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), analisis anggaran kesehatan pemerintah.

Capaian utama program ini kemudian memberikan dampak yang lebih luas di masyarakat seperti menguatnya posisi dan peran Kelompok Kader Posyandu yang sebelumnya hanya menjadi obyek program Pemerintah Daerah, saat ini Kelompok Kader Posyandu berperan sebagai mitra yang memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah. Dampak lain yang terekam adalah, adanya rekognisi dari Pemerintah Daerah (DPRD Kota Tangerang Selatan) kepada organisasi masyarakat sipil untuk membantu pemerintah dalam melakukan penyusunan konsep integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bahan legislasi daerah di tahun berikutnya. Hal lain adalah, mulai terbukanya Dinas Kesehatan dan RSUD setempat akan masukan-masukan oleh masyarakat tanpa harus melalui forum terbatas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

Dampak lain secara fisik adalah, RSUD Kota Tangerang Selatan secara bertahap melakukan perbaikan layanan sesuai dengan hasil rekomendasi dengan menambah kursi di ruang tunggu, optimalisasi sistem pendaftaran pasien dengan menggunakan SMS *Gateway* sebagai basis pengembangan sistem pendaftaran berbasis online, serta perbaikan sarana prasarana umum rumah sakit seperti toilet dan renovasi di lantai 1 dan lantai 5 rumah sakit. Pada saat yang bersamaan, RSUD Kota Tangerang Selatan juga mulai melakukan penataan sistem pelayanan pasien yang diharapkan dapat dilaksanakan di tahun 2018.



Petani Kakao di Desa Tiong Ohang Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

Kontribusi bagi Sektor Lingkungan

Indonesia adalah *mega-biodiversity country* nomor dua di dunia setelah Brazil. Indonesia juga memiliki tidak kurang dari 90 tipe ekosistem. Meskipun hanya merupakan 1,3% luas daratan di dunia, Indonesia memiliki 25% spesies ikan di dunia, 17% spesies burung, 16% spesies reptil dan amfibi, 12% spesies mamalia dan 10% spesies tumbuhan bunga. Indonesia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau, memiliki hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil dengan luasan sekitar 114 juta hektar dan mencakup lebih dari setengah hutan tropis yang kini dimiliki Asia.

Pola pembangunan ekonomi tradisional akan selalu memberikan dampak berat bagi kelestarian lingkungan dan daya dukungnya bagi kehidupan manusia kini dan masa datang. Ekonomi Hijau yang kini didorongkan merupakan upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Ekonomi Hijau adalah konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengelolaan sumber daya dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial.

Salah satu program dalam upaya kontribusi pada sektor lingkungan yang Penabulu kerjakan di tahun ini adalah **Penggunaan Energi Air untuk Rumah Tangga dan Usaha Kakao di Kabupaten Mahakam Ulu** yang didukung oleh Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia). Proyek yang berlokasi di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu ini mencoba mengembangkan model kelola sumber daya alam yang dapat memastikan pemenuhan tuntutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan sumber daya alam lokal secara lestari dan berkelanjutan. Melalui pendekatan *human centered* yang meletakkan manusia/masyarakat sebagai subyek berkebudayaan dalam pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya proyek ini senantiasa mengedepankan penghormatan dan musyawarah untuk memberi ruang keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat selama proyek berjalan maupun pasca proyek.

Jelang berakhirnya proyek di tahun 2017, Penabulu berhasil mencatat hal-hal menarik yang merupakan buah dari proyek; (1) Meningkatnya daya tawar petani kakao di Kecamatan Long Apari sebagai dampak dari meningkatnya kualitas dan produktifitas kakao di kecamatan Long Apari. Sebelum proyek berjalan budidaya tanaman kakao di wilayah ini masih dilakukan dengan cara-cara tradisional dan tidak memperhatikan tata cara budidaya yang baik dan benar. Contoh sederhana adalah adanya asumsi petani bahwa dengan menanam lebih banyak pohon (tanpa memperhatikan jarak tanam) maka akan lebih banyak hasil yang didapatkan. Atau pemanenan buah kakao yang tidak memperhatikan kualitas dan kesiapan buah kakao, kakao yang belum siap petik dipanen atau kakao siap petik dibiarkan membusuk di pohon. Melihat kondisi ini, maka dilakukan berbagai macam aktifitas dalam kerangka peningkatan pengetahuan dan penguatan keterampilan bagi petani kakao sehingga dapat melakukan budidaya tanaman kakao yang baik dan benar. Pada saat yang sama juga dilakukan pengorganisasian kelompok-kelompok petani untuk memutus rantai petani dengan tengkulak, tercatat di akhir proyek, Penabulu telah mendampingi 40 kelompok petani kakao di kecamatan Long Apari dan Long Pahangai; (2) Terpenuhinya hak warga melalui *community-based small-scale renewable energy*. Proyek Kemakmuran Hijau dengan pembangunan energi terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro-PLTMH) ini ditujukan untuk pemenuhan hak warga negara yang belum mendapatkan aliran listrik. Pembangunan energi terbarukan ini kemudian diintegrasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, yaitu industrialisasi perdesaan berbasis kakao. (3) Pelembagaan organisasi masyarakat sebagai *exit strategy* dan jaminan keberlanjutan program. Di akhir proyek Penabulu telah berhasil menginisiasi terbentuknya lembaga lokal, Badan Pengelola Ekonomi Rakyat (BPER) yang akan berperan untuk mengelola PLTMH dan ketermanfaatan PLTMH di tahap yang lebih lanjut. Tidak hanya menginisiasi, Penabulu juga melakukan serangkaian pendampingan teknis untuk memastikan BPER dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Program lain yang masih dalam ruang lingkup lingkungan di tahun ini adalah **Strengthening The Capacity of Civil Society Organizations for Effective Conservation Action in Indonesia** yang didukung oleh Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). Di tahun ke-2 proyek yang mendukung aksi konservasi di wilayah Wallacea melalui peningkatan kapasitas bagi organisasi mitra CEPF ini lebih berfokus pada pelatihan-pelatihan tematik sesuai arahan strategis yang telah ditetapkan. Di kurun waktu ini tercatat 4 pelatihan tematik diadakan untuk mitra CEPF yakni; (1) Pelatihan Tematik SD-4 untuk Marine di desa Baho minahasa utara yang diikuti oleh 12 mitra; (2) Pelatihan Tematik SD-1 untuk Perlindungan Jenis yang diikuti oleh 9 mitra; (3) Pelatihan Tematik SD-3 untuk Komoditi di Bantaeng Makassar yang diikuti 9 mitra; dan (4) Pelatihan Tematik SD-3 untuk Permakultur di Bali yang diikuti oleh 9 mitra.

Di tahun ini juga dilakukan asesmen bagi mitra-mitra CEPF baik mitra baru maupun mitra lama. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengetahui situasi terkini mitra sehingga dapat menjadi basis untuk menetapkan model peningkatan kapasitas tahap lanjut bagi mitra CEPF yang akan mendukung keberlanjutan organisasi lokal dalam kerangka aksi konservasi di Wallacea. Asesmen ini dilakukan di 7 *Priority Fund Areas* (PFA) program CEPF dan diikuti oleh 42 mitra.

Di saat yang sama juga dilakukan inisiasi pembentukan forum mitra CEPF sebagai sarana untuk daya dukung bagi tercapainya mandat utama program dan sebagai ruang pembelajaran antar mitra. Inisiasi forum pertama ini dilakukan di PFA-1 Manado dan diikuti oleh 6 mitra CEPF yakni; Perkumpulan Manengkel, WCS, Rumah Ganeca, Perkumpulan Sampiri, YAPEKA dan IDEP.

Konservasi yang berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk percepatan pemulihan daya dukung lingkungan sehingga manfaat yang diberikan lingkungan tidak hanya pada saat sekarang namun juga di masa depan. Salah satu upaya untuk menjamin keberlanjutan aksi konservasi di suatu wilayah adalah dengan adanya keterlibatan dari seluruh pihak termasuk pemangku kepentingan dan kebijakan di wilayah tersebut. Diawali dengan serangkaian fasilitasi penyusunan rencana implementasi Kelola Sendang di Sumatera Selatan tahun sebelumnya, di tahun ini masih dengan dukungan dari Zoological Society of London (ZSL) Penabulu membantu upaya pemerintah setempat untuk pengelolaan lanskap yang berkelanjutan melalui program **Pengembangan Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (Masterplan Kelola Sendang)**.

Masterplan Kelola Sendang merupakan dokumen perencanaan yang memuat kondisi biofisik dan sosial ekonomi lanskap Sembilang Dangku, isu strategis, rencana program dan target bersama para pemangku kepentingan. Masterplan ini akan mengkonsolidasikan seluruh rencana kerja para pihak pada lanskap Sembilang Dangku, sehingga akan terjadi sinergi antar sektor dan meningkatkan keberhasilan program.

Dokumen masterplan ini disusun oleh Tim Project Supervisory Unit dan Project Implementing Unit (PSU-PIU) Kelola Sendang dengan didampingi oleh Tim Penabulu yang membantu ZSL dalam KELOLA Sendang Project. Anggota Tim PSU-PIU berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel dan PIC Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Tim PSU-PIU mengadakan Rapat Kerja pertama pada September 2017 dengan fasilitator Tim Penabulu.



Pesisir Pantai Dusun Sembilang, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan

Kontribusi bagi Desa

Tata kelola pemerintahan desa yang baik, berbasis perencanaan pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan syarat utama bagi terwujudnya desa yang lestari. Partisipasi, kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam tata kelola kelembagaan dan pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi dan keuangan desa, penguatan ekonomi masyarakat desa, pembentukan dan pengelolaan Koperasi dan BUMDesa serta pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya lingkungan alam yang dimiliki desa merupakan aspek-aspek yang akan mendukung terwujudnya desa lestari.

Tahun 2017 merupakan tahun ke-3 berjalannya konsep Desa Lestari, di tahun ini beragam aktivitas dilakukan oleh Penabulu sebagai bagian untuk pemberdayaan desa. Beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam kerangka Desa Lestari merupakan implementasi tahap lanjut dari program sebelumnya. Pada saat yang sama upaya untuk peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak yang bekerja untuk desa juga terus dilakukan melalui pelatihan-pelatihan reguler, seperti pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Seperti yang tercantum dalam amanat UU 6/2014, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Selanjutnya BUMDesa merupakan usaha yang dibentuk sebagai perwujudan kehadiran Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendayagunakan sumberdaya ekonomi lokal. Kehadirannya dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Di tahun 2017 ini Penabulu berkesempatan untuk berkontribusi pada upaya restorasi wilayah gambut melalui **Lokakarya dan Pelatihan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi dalam Kerangka Restorasi Gambut**, kegiatan ini didukung oleh dana APBN melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia.

Kawasan hidrologis gambut merupakan wilayah unik dengan karakteristik tersendiri, sebagai akibat dari kesalahan penanganan di masa lampau, kawasan gambut kemudian mengalami kerusakan yang luar biasa dan menjadi penyumbang polusi yang diakibatkan oleh kebakaran lahan gambut. BRG mengemban amanat mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak sebagai dampak kebakaran dan pengeringan. Desa Peduli Gambut (DPG) merupakan salah satu strategi untuk percepatan pemulihan lahan gambut di 7 provinsi target restorasi gambut, sementara BUMDesa dipandang sebagai salah satu alat yang dapat mendukung upaya revitalisasi mata pencaharian di wilayah ini sehingga upaya restorasi dapat dipenuhi.

Kegiatan lokakarya ini diselenggarakan di 3 region yakni; Sumatera, Kalimantan dan Papua, serta diikuti oleh 75 Desa/Kelurahan Peduli Gambut, dengan total peserta sebanyak 450 orang yang merupakan representasi dari aparatatur pemerintahan desa, pengelola BUMDesa, dan fasilitator desa.

Selain pelatihan untuk DPG, catatan menarik dalam lingkup pemberdayaan desa datang dari program **Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Nilai-nilai Demokrasi dalam Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) di tingkat Pemerintah Desa hingga Kabupaten di Wilayah Kerja IDRAP**. Di periode akhir program yang memiliki tujuan untuk mendorong terbangunnya kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam memperkuat tata pemerintahan yang baik melalui penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam upaya advokasi transparansi, akuntabilitas sosial, dan keterbukaan informasi publik. Untuk memperkuat dukungan dalam perwujudan keterbukaan informasi publik, Penabulu memfasilitasi masyarakat setempat dalam pendirian dan pemanfaatan Radio Komunitas sebagai sarana untuk mengikat kohesivitas sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sosial yang memungkinkan terwujudnya perubahan sosial Di Desa Bente dan Desa Labuan Bajo di Kabupaten Buton Utara, serta Desa Lambangi dan Desa Andinete di Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara. Radio komunitas tersebut kini telah dapat menjadi media yang mempertemukan dialog-dialog terbuka antara masyarakat dengan Pemerintah Desa, terutama dalam pemantauan pembangunan desa.

Pendampingan Penabulu untuk mendorong pemberdayaan desa, membantu menciptakan masa depan desa, dan mewujudkan kemakmuran dalam implementasi dan pelaksanaan UU Desa melalui program **Mendukung Program Desa Lestari di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** di tiga desa di DIY, yaitu Desa Sumbermulyo (Kab. Bantul), Desa Ponjong dan Desa Bleberan (Kab. Gunungkidul) dengan dukungan dari Saemaul Global Foundation juga memberikan catatan capaian tersendiri. Dalam dua tahun masa pendampingan, ketiga desa tersebut semakin matang dalam perencanaan pembangunan, berdaya untuk memperjuangkan keswadayaan masyarakat, dan menguatnya kapasitas pemerintah desa dalam mengangkat potensi lokal yang dimiliki.



Pelatihan Mobilisasi Sumberdaya Bagi Populasi Kunci Isu HIV, Semarang

Kontribusi bagi Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil/Komunitas

Kelembagaan publik dan lembaga yang bekerja bagi kepentingan publik menjadi fokus kerja sejak awal berdirinya Penabulu dengan titik tekan utama diberikan kepada penguatan kapasitas organisasi nirlaba/organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Keberlanjutan organisasi senantiasa menjadi isu yang senantiasa menghantui bagi organisasi nirlaba di Indonesia. Ketangguhan pilar keuangan dan kekuatan pengelolaan program saja ternyata tak cukup mampu menjamin keberlanjutan organisasi tanpa upaya dan kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya yang seluas-luasnya.

Indonesia AIDS Coalition merupakan organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu keberlanjutan organisasi, khususnya bagi organisasi dan komunitas populasi kunci yang bekerja di isu HIV. Di fase terakhir program **Resources Mobilization Workshop for Strengthening The HIV/AIDS Key Population in Indonesia**, Penabulu melatih organisasi/komunitas populasi kunci mitra IAC yang tersebar di 47 kota di Indonesia. Selain lokakarya, hasil akhir yang dicapai dalam program ini adalah tersusunnya serial Modul Mobilisasi Sumberdaya bagi Organisasi Nirlaba yang terdiri atas 4 modul yakni; Modul 1: Mobilisasi Sumber Daya bagi Organisasi Nirlaba – Dasar; Modul 2: Mobilisasi Sumber Daya bagi Organisasi Nirlaba – Pelibatan Sektor Swasta; Modul 3: Mobilisasi Sumber Daya bagi Organisasi Nirlaba – Pengeolaan Relawan; dan Modul 4: Mobilisasi Sumber Daya bagi Organisasi Nirlaba – Pemanfaatan TIK.

Perhatian Penabulu terhadap keberlanjutan organisasi nirlaba/komunitas melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya mendapatkan sambutan pula dari Robert Bosch Stiftung Jerman melalui **Pelatihan Mobilisasi Sumber Daya untuk 90 OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) di 6 Wilayah di Indonesia** pada tahun yang sama. Melalui mekanisme seleksi yang diikuti tak kurang dari 30 organisasi pelamar di setiap kota tempat diselenggarakan kegiatan. Di fase ini pelatihan terselenggara di Yogyakarta, Medan, Makassar, Pontianak dan Mataram dengan jumlah peserta 75 organisasi masyarakat sipil/komunitas dari berbagai macam isu yang digeluti.

Selain mobilisasi sumberdaya di tahun ini Penabulu juga mendampingi beberapa organisasi untuk memperkuat dan mengembangkan organisasi melalui penyusunan sistem pengelolaan keuangan organisasi, perencanaan srategis organisasi, pengembangan skema keberlanjutan organisasi, pengembangan program dan lain sebagainya.



Heru Satria Rukmana

Perumahan Bukit Waringin
Bluk A No. 7 - 8
Bojong Gede 16320, Bogor

Telp : +62 21 87970090
Fas : +62 21 87970090
Kap_hsr@yahoo.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No.: YPB17/LA/KAPHSR/260918

**Badan Pengurus dan Pengawas
Yayasan Penabulu
Jakarta**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Yayasan Penabulu** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Number : YPB17/LA/KAPHSR/260918

**Board of Executives and Supervisory
Yayasan Penabulu
Jakarta**

We have audited the accompanying financial statements **Yayasan Penabulu** which comprise the financial statements as of December 31, 2017 the related statement of activities, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but



Honest, Satisfaction, Reliable

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami percaya bahwa bukti audit kami telah memperoleh cukup dan tepat untuk memberikan dasar untuk menyatakan opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir yang kami sebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Yayasan Penabulu** tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's responsibility (continued)

not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **Yayasan Penabulu** as of December 31, 2017 its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK/REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

HERU SATRIA RUKMANA


Kantor Akuntan Publik
Heru Satria Rukmana

Dr. Heru Satria Rukmana, Ak., MM., CA., CPA
NRAP AP. 1520/Public Accountant Registration Number AP.1520

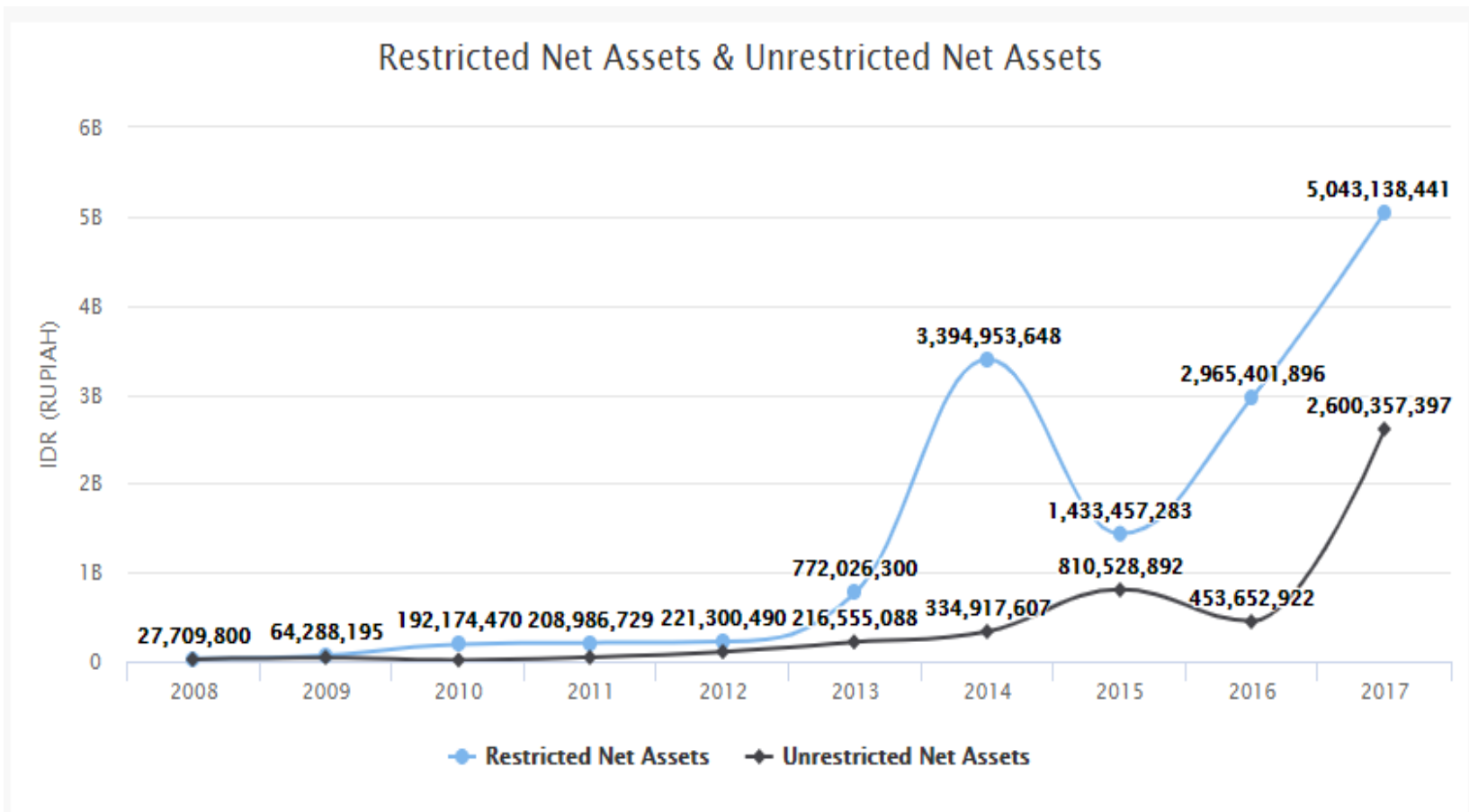
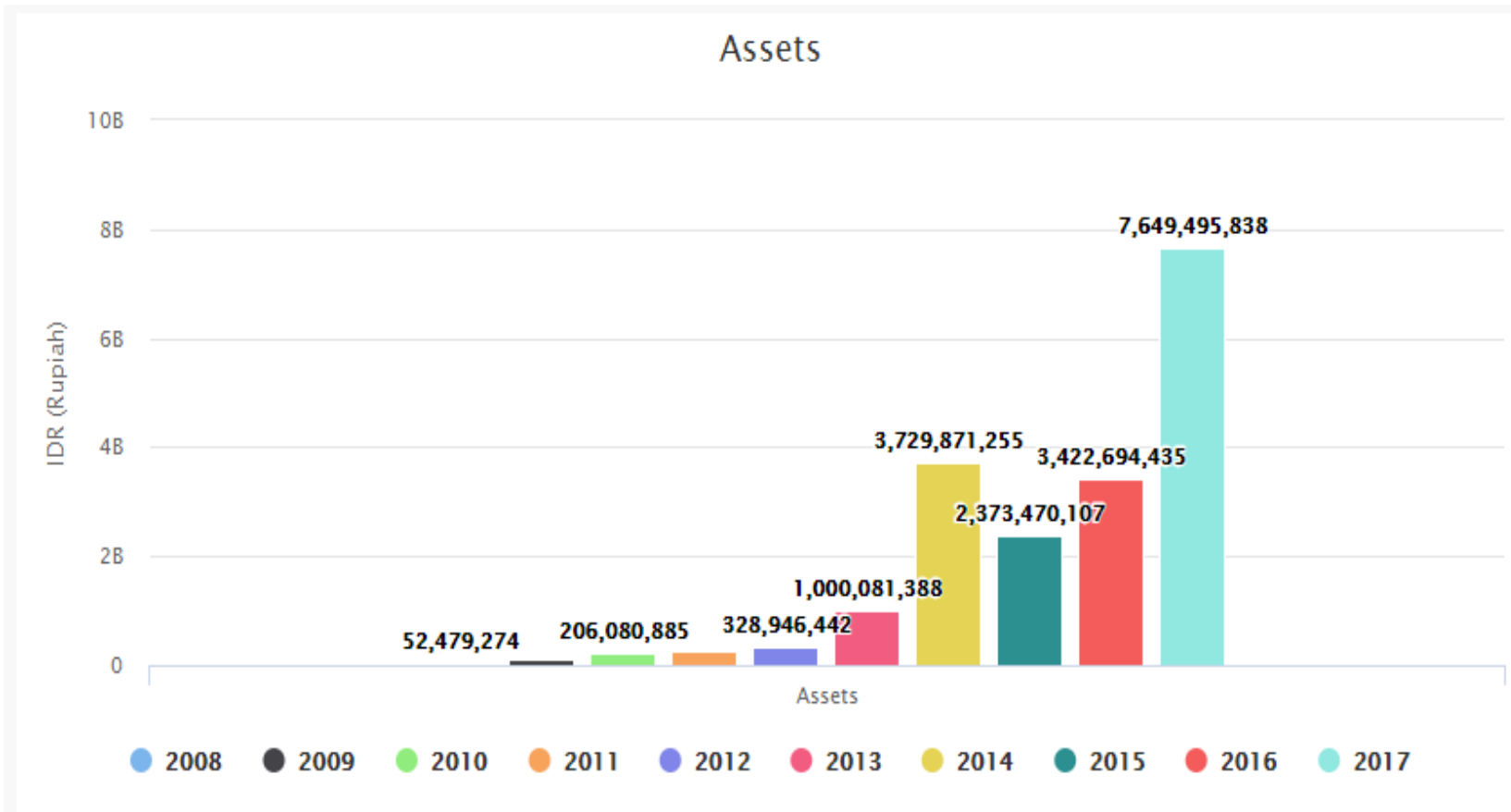
Bogor, 26 September, 2018/September 26, 2018

The accompanying financial statements are not intended to present the financial positions, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

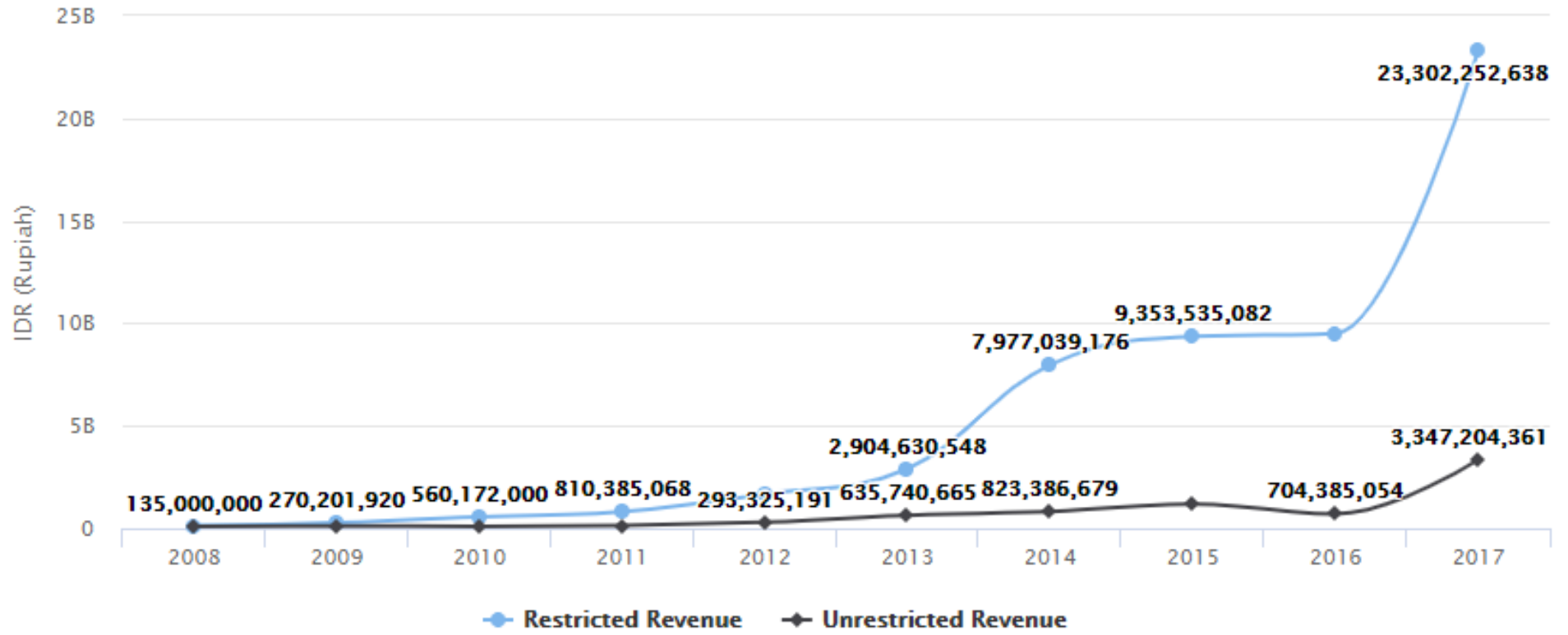


Suku Dayak Bahau, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur

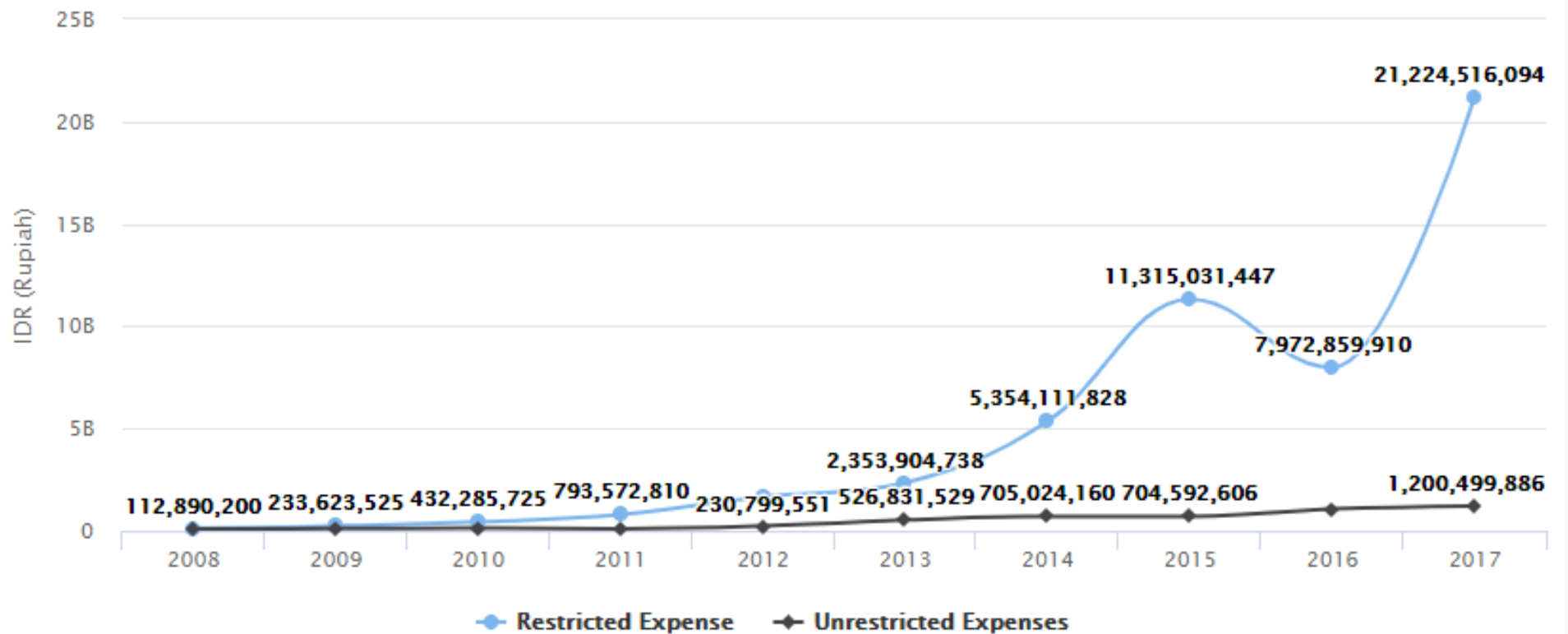
Figur Keuangan 2017

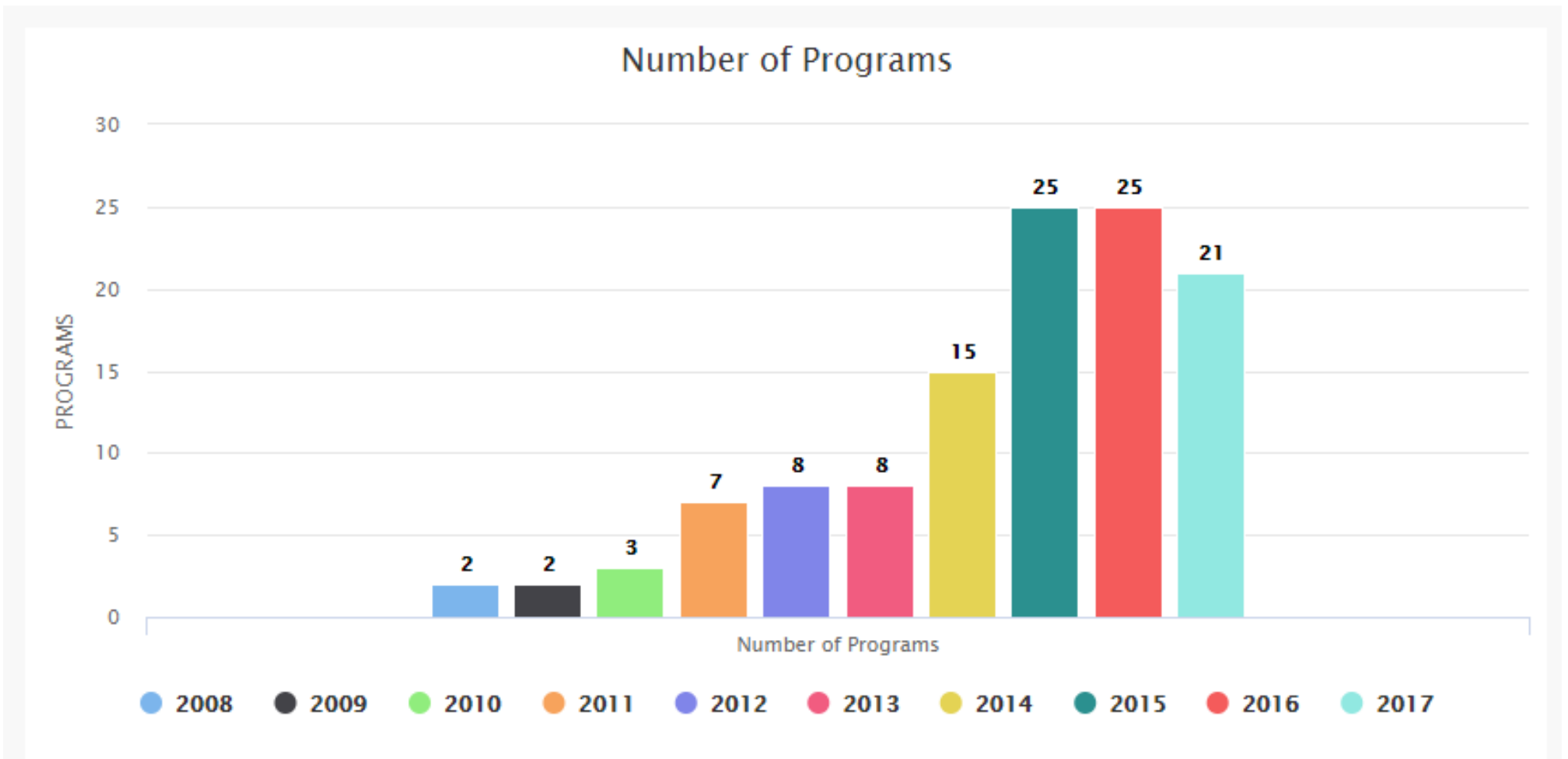


Revenue



Expenses





Sumber: <http://penabulufoundation.org/laporan-keuangan-penabulu/>

